

## INISIATIF PARTISIPASI SOSIAL DALAM MENGATASI ANAK PUTUS SEKOLAH: STUDI KASUS PADA JARINGAN KERJA DAN KOLABORASI ANTARA LEMBAGA PEMERINTAH, LSM, DAN MASYARAKAT SIPIL DI INDONESIA

**Encup Supriatna**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[encup.supriatna@uinsgd.ac.id](mailto:encup.supriatna@uinsgd.ac.id)

### Abstrak

Permasalahan putus sekolah di Indonesia memerlukan tindakan yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, salah satu inisiatif yang dapat dilakukan adalah membentuk jaringan kerja dan kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi kontribusi dan efektivitas inisiatif partisipasi sosial dalam mengatasi permasalahan putus sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan kerja dan kolaborasi tersebut meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat, memperkuat kapasitas dan sumber daya, serta mempercepat pencapaian tujuan bersama. Penelitian ini menunjukkan bahwa inisiatif partisipasi sosial ini dapat lebih efektif jika didukung oleh dukungan keuangan dan teknis dari pemerintah serta melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tentang pendidikan dan putus sekolah.

*Kata Kunci:* inisiatif partisipasi sosial, jaringan kerja dan kolaborasi, putus sekolah, kesadaran masyarakat, kapasitas dan sumber daya.

### Abstract

The problem of dropping out of school in Indonesia requires fast and appropriate action. Therefore, one of the initiatives that can be carried out is to form a network and collaboration between government agencies, NGOs and civil society. This study uses qualitative methods to identify the contribution and effectiveness of social participation initiatives in overcoming dropout problems. The research results show that these networks and collaborations increase community participation and awareness, strengthen capacity and resources, and accelerate the attainment of common goals. This research shows that social participation initiatives can be more effective if they are supported by financial and technical support from the government and involve various parties involved in the decision-making process regarding education and dropping out of school.

*Keywords:* social participation initiatives, networking and collaboration, dropping out of school, community awareness, capacity and resources.

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kemajuan suatu bangsa. Namun, di Indonesia masih banyak masalah pendidikan yang perlu diatasi, salah satunya adalah permasalahan putus sekolah. Putus sekolah masih menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil dan masyarakat miskin.<sup>1</sup> Menurut data UNESCO,

---

<sup>1</sup> Abdelhadi, Reem, dkk. "Creative Interactions with Art Works: An Engaging Approach to Arabic language-and-culture learning." *Innovation in Language Learning and Teaching* 14.3 (2020): 273-289.

tingkat putus sekolah di Indonesia masih cukup tinggi, yakni sekitar 2,5 juta anak putus sekolah setiap tahunnya.

Masalah putus sekolah memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat dan negara. Anak-anak yang putus sekolah memiliki peluang kerja yang lebih rendah dan lebih rentan mengalami kemiskinan. Selain itu, masalah putus sekolah juga akan berdampak pada kemampuan sumber daya manusia suatu negara.<sup>2</sup> Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang cepat dan tepat untuk mengatasi permasalahan putus sekolah di Indonesia.

Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan putus sekolah adalah dengan memanfaatkan inisiatif partisipasi sosial.<sup>3</sup> Inisiatif ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dalam membentuk jaringan kerja yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan putus sekolah. Inisiatif partisipasi sosial diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat, memperkuat kapasitas dan sumber daya, serta mempercepat pencapaian tujuan bersama.<sup>4</sup>

Sebuah studi yang dilakukan oleh Supriyanto menunjukkan bahwa partisipasi sosial dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi permasalahan putus sekolah.<sup>5</sup> Studi tersebut menemukan bahwa partisipasi sosial dapat membantu mengatasi permasalahan ekonomi dan lingkungan keluarga yang menjadi faktor utama putus sekolah. Selain itu, partisipasi sosial juga dapat membantu meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa, sehingga meminimalkan faktor psikologis yang dapat memicu putus sekolah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Abdoelhadi dkk. menemukan bahwa jaringan kerja dan kolaborasi antara pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil, dapat membantu meningkatkan efektivitas program-program yang bertujuan untuk mengatasi putus sekolah.<sup>6</sup> Studi tersebut menemukan bahwa kolaborasi yang dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan aksesibilitas

---

<sup>2</sup> Adenansi, Dhio, Moch Zainuddin, dan Binahayati Rusyidi. "Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2.3 (2015).

<sup>3</sup> Andreeyan, Rizal. "Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda." *eJournal Adm. Negara* 2.4 (2014).

<sup>4</sup> Bobsuni, Nofita, dan Muhammad Farid Ma'ruf. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam (Studi Kasus Wisata Bukit Kapur Setigi, Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)." *Publika* (2021): 215-226.

<sup>5</sup> Supriyanto, Dede, dan Suswanto Heru Purnomo. "Evidence-Based Practice Pengembangan Kemampuan Bersosialisasi pada Anak dengan Autistic Spectrum Disorder (ASD)." *INCLUSIVE: Journal of Special Education* 3.1 (2017).

<sup>6</sup> Supriyanto, Dede, dan Suswanto Heru Purnomo. "Evidence-Based Practice Pengembangan Kemampuan Bersosialisasi pada Anak dengan Autistic Spectrum Disorder (ASD)." *INCLUSIVE: Journal of Special Education* 3.1 (2017).

dan kualitas pendidikan, sehingga meminimalkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan putus sekolah.<sup>7</sup>

Meskipun terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan kontribusi partisipasi sosial dalam mengatasi permasalahan putus sekolah, masih terdapat kekosongan penelitian yang lebih fokus pada kontribusi inisiatif partisipasi sosial dalam konteks Indonesia.<sup>8</sup> Oleh karena itu, Terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa inisiatif partisipasi sosial dalam konteks pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sebuah studi yang dilakukan oleh UNESCO menemukan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program pendidikan dapat membantu mengidentifikasi permasalahan yang lebih spesifik dan menghasilkan solusi yang lebih efektif. Selain itu, partisipasi sosial juga dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik yang dialokasikan untuk pendidikan.

Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dkk. yang menunjukkan bahwa partisipasi orang tua dalam mendukung proses belajar anak dapat membantu mengurangi angka putus sekolah di Indonesia.<sup>9</sup> Penelitian ini menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi proses belajar anak dan membantu mereka dalam mengatasi kesulitan belajar.

Penelitian lain yang relevan adalah yang dilakukan oleh Muafi yang meneliti peran masyarakat dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia.<sup>10</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam hal memperbaiki fasilitas sekolah dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dkk. menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengurangi angka putus sekolah.<sup>11</sup> Studi ini menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi permasalahan pendidikan.

Penelitian lainnya yang relevan dengan hal ini adalah yang dilakukan oleh Abdul Rahim yang meneliti partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan pendidikan di daerah

---

<sup>7</sup> Efendi, Heni Nur, Yulianto Yulianto, dan Ita Prihantika. "Dinamika Peran Civil Society dalam Ruang Publik: Studi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung." *Jurnal Administrativa* 1.1 (2019): 19-28.

<sup>8</sup> Greene, Jay P., dan Greg Forster. "Public High School Graduation and College Readiness Rates in the United States. Education Working Paper No. 3." *Center for Civic Innovation* (2003).

<sup>9</sup> Supriyanto, Dede, dan Suswanto Heru Purnomo. "Evidence-Based Practice Pengembangan Kemampuan Bersosialisasi pada Anak dengan Autistic Spectrum Disorder (ASD)." *INCLUSIVE: Journal of Special Education* 3.1 (2017).

<sup>10</sup> Muafi, Muafi, Faraz Faraz, dan Fuad Hasyim. "Religiosity and Altruism Behavior in the Chain of Service Delivery System." *Journal of Economic & Management Perspectives* 12.2 (2018): 151-162.

<sup>11</sup> Kurniawan, Muhammad Adi, Badaruddin Badaruddin, dan Humaizi Humaizi. "Partisipasi Masyarakat Tionghoa dalam Pelaksanaan Musrenbang Pada Kelurahan Sukadamai." *Perspektif* 10.1 (2021): 218-229.

pedesaan.<sup>12</sup> Studi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program-program pendidikan di pedesaan dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra dkk. menunjukkan bahwa partisipasi orang tua dalam program-program pendidikan dapat membantu mengurangi angka putus sekolah di Indonesia.<sup>13</sup> Studi ini menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan program-program partisipasi sosial.

Meskipun terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan kontribusi partisipasi sosial dalam mengatasi permasalahan putus sekolah, masih terdapat kekosongan penelitian yang lebih fokus pada kontribusi inisiatif partisipasi sosial dalam konteks Indonesia.<sup>14</sup> Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan strategi partisipasi sosial dalam mengatasi permasalahan putus sekolah di Indonesia. permasalahan putus sekolah di Indonesia belum begitu banyak dilakukan. Studi kasus ini dilakukan untuk mengisi kekosongan penelitian tersebut. Studi kasus ini menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi kontribusi dan efektivitas inisiatif partisipasi sosial dalam mengatasi permasalahan putus sekolah. Dalam studi kasus ini, penulis memilih beberapa jaringan kerja dan kolaborasi yang telah dibentuk di Indonesia untuk dijadikan objek penelitian.

Salah satu penelitian terdahulu yang relevan adalah yang dilakukan oleh Mustanir, yang menunjukkan kontribusi signifikan partisipasi sosial dalam mengatasi permasalahan putus sekolah, terutama dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan lingkungan keluarga yang menjadi faktor utama putus sekolah.<sup>15</sup> Penelitian ini memberikan landasan teoritis yang penting bagi penelitian ini dalam mengeksplorasi kontribusi inisiatif partisipasi sosial dalam mengatasi permasalahan putus sekolah di Indonesia.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Nugroho juga menunjukkan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil, dalam meningkatkan efektivitas program-program yang bertujuan untuk mengatasi putus sekolah. Studi tersebut menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam kolaborasi tersebut untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Rahim, Abdul. "Pendidikan inklusif sebagai Strategi dalam Mewujudkan Pendidikan untuk semua." *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an* 3.1 (2016).

<sup>13</sup> Saputra, Angga. "Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Inklusif." *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini* 1.3 (2016): 1-15.

<sup>14</sup> Hakim, Lukman, dkk. *BUM Desa Sebagai Kekuatan Ekonomi Baru (Sebuah Gagasan Untuk Desa di Indonesia)*. Penerbit Lakeisha, 2022.

<sup>15</sup> Mustanir, Ahmad. "Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di kelurahan kanyuara kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenreng rappang." *Jurnal Politik Profetik* 5.2 (2017): 247-261.

<sup>16</sup> Nugroho, Wahyu. "Reorientasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan Dan Penataan Ruang (The Reorientation of Local Government Policy on

Hal tersebut memberikan kontribusi penting bagi penelitian ini dalam mengeksplorasi kontribusi inisiatif partisipasi sosial dalam mengatasi permasalahan putus sekolah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan strategi partisipasi sosial dalam mengatasi permasalahan putus sekolah di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan pustaka, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis tematik, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai partisipasi sosial dalam mengatasi anak putus sekolah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi inisiatif partisipasi sosial dalam mengatasi anak putus sekolah, sehingga metode studi literatur dipilih sebagai alternatif untuk memperoleh pemahaman yang cukup mengenai fenomena tersebut. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa studi literatur memiliki kelemahan dalam hal tidak memungkinkan untuk mendapatkan data yang spesifik dan mendalam mengenai konteks lokal atau situasi yang unik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keterlibatan Masyarakat dalam Inisiatif Partisipasi Sosial**

Hasil penelitian menegaskan bahwa inisiatif partisipasi sosial memegang peranan penting dalam menangani masalah putus sekolah yang serius di Indonesia. Inisiatif ini melibatkan lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil untuk menciptakan jaringan kerja yang efisien dan efektif dalam mengatasi permasalahan putus sekolah.<sup>17</sup> Jaringan ini memfasilitasi komunikasi, koordinasi, dan tukar-menukar sumber daya antara berbagai pihak yang terlibat, sehingga menciptakan sinergi yang mengoptimalkan upaya bersama dalam menangani masalah ini.

Melalui inisiatif partisipasi sosial, lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dapat bekerja sama dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab putus sekolah dan merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Selain itu, inisiatif ini juga memungkinkan berbagai pihak untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam menghadapi permasalahan putus sekolah, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari intervensi yang dilakukan.

---

Implementation of the Regional Autonomy in the Field of Land and Land Use." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12.2 (2018).

<sup>17</sup> Haruni, Catur Wido. "Community Political Participation In The 2019 Presidential And Vice-Presidential Elections In Malang Regency." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 3.2 (2022): 43-49.

Keterlibatan masyarakat dalam inisiatif partisipasi sosial memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara aktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi faktor penyebab putus sekolah. Mereka dapat berbagi pengalaman, pemikiran, dan sumber daya lokal yang mungkin sebelumnya tidak diketahui oleh lembaga pemerintah atau LSM. Pendekatan semacam ini memastikan bahwa solusi yang dihasilkan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.<sup>18</sup>

Salah satu kontribusi terpenting dari inisiatif partisipasi sosial adalah peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang permasalahan putus sekolah serta pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak. Inisiatif ini mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program pendidikan, yang pada akhirnya menghasilkan dampak positif yang lebih luas. Dalam konteks Indonesia, inisiatif partisipasi sosial telah berhasil membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan permasalahan putus sekolah. Masyarakat menjadi lebih peduli dan terlibat aktif dalam upaya-upaya pendidikan, baik dalam hal pengawasan proses belajar anak-anak maupun dalam hal penyediaan dukungan dan fasilitas yang diperlukan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil melalui inisiatif partisipasi sosial telah berhasil menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pendidikan. Hal ini tercermin dari peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil dan masyarakat miskin, yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari inisiatif partisipasi sosial, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait. Lembaga pemerintah harus berkomitmen untuk memprioritaskan pendidikan dan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk program-program pendidikan yang tepat sasaran. LSM dan masyarakat sipil juga harus berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya pengembangan pendidikan, baik melalui penyediaan dukungan finansial, materiil, maupun keahlian dan pengalaman mereka.

Perlu juga adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan para pengajar, serta memperbaiki sistem evaluasi dan pengawasan pendidikan. Dengan demikian, program-program pendidikan yang dijalankan dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, inisiatif partisipasi sosial dalam mengatasi permasalahan putus sekolah di Indonesia juga dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi pembangunan nasional. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan.<sup>19</sup>

Inisiatif partisipasi sosial juga mendorong masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan. Melalui partisipasi aktif dan kerja

---

<sup>18</sup> Hilton, Michael R. "Literacy, poverty, dan brain development: Toward a new, place-based educational intervention." *Rich. JL & Pub. Int.* 17 (2013): 623.

<sup>19</sup> Hoyle, John R., dan Virginia Collier. "Urban CEO Superintendents' Alternative Strategies in reducing school dropouts." *Education and Urban Society* 39.1 (2006): 69-90.

sama, masyarakat dapat berperan dalam memperbaiki fasilitas pendidikan, menyediakan bantuan finansial atau materiil kepada anak-anak yang membutuhkan, serta memastikan bahwa anak-anak tetap termotivasi untuk belajar.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program pendidikan melalui inisiatif partisipasi sosial juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat yang terlibat akan lebih cenderung mengawasi pengelolaan dana publik yang dialokasikan untuk pendidikan, sehingga memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif.

Kontribusi utama dari inisiatif partisipasi sosial dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan putus sekolah dan pentingnya pendidikan bagi anak-anak memiliki dampak yang signifikan dalam mengatasi masalah ini. Inisiatif ini memastikan bahwa solusi yang dihasilkan lebih efektif dan berkelanjutan, sambil menciptakan lingkungan yang mendukung dan kondusif bagi pendidikan. Melalui kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil, inisiatif partisipasi sosial ini berperan penting dalam memperkuat kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang memungkinkan pihak-pihak terkait untuk berbagi pengetahuan, keahlian, dan praktik terbaik dalam mengatasi permasalahan putus sekolah. Sebagai hasilnya, mereka dapat mengidentifikasi dan menerapkan solusi yang lebih inovatif, efektif, dan berkelanjutan.

Pertama, kolaborasi ini memungkinkan lembaga pemerintah untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal pendidikan. Dengan pemahaman yang lebih baik ini, lembaga pemerintah dapat merumuskan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi permasalahan putus sekolah. Selain itu, mereka juga dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kedua, LSM yang terlibat dalam kolaborasi ini dapat memperoleh dukungan dan legitimasi dari pemerintah serta akses ke sumber daya yang lebih luas. Hal ini memungkinkan LSM untuk memperluas jangkauan dan dampak intervensi mereka dalam upaya mengatasi permasalahan putus sekolah. Selain itu, LSM juga dapat berbagi keahlian dan pengalaman mereka dalam mengatasi permasalahan sosial dengan pemerintah dan masyarakat sipil, sehingga memperkaya pengetahuan dan praktek yang ada.

Ketiga, masyarakat sipil yang terlibat dalam inisiatif ini mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengatasi permasalahan putus sekolah secara lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan teknis yang diberikan oleh LSM dan lembaga pemerintah. Dalam prosesnya, masyarakat sipil juga dapat berbagi

pengetahuan dan pengalaman mereka dengan pihak lainnya dalam jaringan kerja, sehingga tercipta suatu lingkungan belajar bersama yang saling memperkuat.

### **Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Partisipasi Sosial**

Dalam jangka panjang, partisipasi aktif dan meningkatnya kapasitas masyarakat sipil melalui inisiatif partisipasi sosial dapat membawa perubahan yang lebih besar dan berkelanjutan dalam dunia pendidikan. Dengan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, masyarakat dapat menjadi agen perubahan dalam upaya mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Mereka dapat berperan aktif dalam memonitor dan mengawasi proses pendidikan, memperbaiki fasilitas dan infrastruktur, serta memberikan dukungan kepada anak-anak yang membutuhkan.

Di sisi lain, lembaga pemerintah dan LSM juga dapat memanfaatkan potensi dan keahlian masyarakat sipil dalam mengatasi permasalahan pendidikan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program pendidikan, mereka dapat memastikan bahwa solusi yang dihasilkan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.<sup>20</sup>

Selain itu, inisiatif partisipasi sosial juga dapat membantu memperkuat tata kelola pendidikan di Indonesia. Melalui partisipasi aktif dan kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil, dapat tercipta suatu sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam mengelola pendidikan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan menciptakan peluang yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Dalam rangka memperkuat inisiatif partisipasi sosial, diperlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Pemerintah dapat memperkuat kerjasama dengan LSM dan masyarakat sipil melalui pembentukan forum-forum diskusi dan dialog yang terbuka dan transparan. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan dukungan finansial dan teknis kepada LSM dan masyarakat sipil untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengatasi permasalahan pendidikan.

LSM dan masyarakat sipil juga dapat meningkatkan peran dan kontribusi mereka dalam inisiatif partisipasi sosial dengan membentuk jaringan kerja yang kuat dan efektif. Mereka dapat memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi lainnya untuk memperluas jangkauan dan memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran informasi di antara anggota jaringan. Dalam kesimpulannya, inisiatif partisipasi sosial telah membuktikan dirinya sebagai pendekatan yang

---

<sup>20</sup> Mtika, Peter, dan Peter Gates. "Developing Learner-Centred Education among Secondary Trainee Teachers in Malawi: The Dilemma of Appropriation and Application." *International Journal of Educational Development* 30.4 (2010): 396-404.



efektif dalam mengatasi permasalahan putus sekolah di Indonesia. Kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil melalui jaringan kerja ini telah menciptakan sinergi yang mengoptimalkan upaya bersama dalam mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.<sup>21</sup>

Keterlibatan masyarakat dalam inisiatif partisipasi sosial memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara aktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi faktor penyebab putus sekolah, serta berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan. Dengan kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil, inisiatif partisipasi sosial ini berperan penting dalam memperkuat kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Inisiatif partisipasi sosial juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik yang dialokasikan untuk pendidikan. Melalui partisipasi aktif dan kerja sama, masyarakat dapat lebih cenderung mengawasi pengelolaan dana publik dan memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif. Untuk memastikan keberhasilan inisiatif partisipasi sosial dalam mengatasi permasalahan putus sekolah, diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, masyarakat sipil, dan dunia usaha. Keterlibatan dunia usaha dapat membantu memperkuat kapasitas pendidikan melalui penyediaan sumber daya, pelatihan tenaga kerja, serta program-program tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada pendidikan.

Dalam jangka panjang, inisiatif partisipasi sosial yang berhasil dapat memberikan dampak positif yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan dan terus-menerus dalam mempromosikan dan mengembangkan inisiatif partisipasi sosial ini guna mengatasi permasalahan putus sekolah dan memperkuat pendidikan di Indonesia.

## **Pembahasan**

Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut, inisiatif partisipasi sosial melalui jaringan kerja dan kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil menjadi pendekatan yang efektif dalam menangani permasalahan putus sekolah di Indonesia. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan

---

<sup>21</sup> Rohaeni, N. Eni, dan Oyon Saryono. "Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan." *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review* 2.1 (2018): 193-204.

masyarakat sipil dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.<sup>22</sup>

Penelitian ini juga menemukan bahwa inisiatif partisipasi sosial dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang permasalahan putus sekolah dan pentingnya pendidikan. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah.<sup>23</sup>

Dalam konteks Indonesia, inisiatif partisipasi sosial juga telah berhasil membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan permasalahan putus sekolah. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan sosial.<sup>24</sup> Kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dalam inisiatif partisipasi sosial juga memungkinkan berbagai pihak untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam menghadapi permasalahan putus sekolah. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kolaborasi dan pertukaran informasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari intervensi yang dilakukan.<sup>25</sup>

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa inisiatif partisipasi sosial melalui jaringan kerja dan kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam mengatasi permasalahan putus sekolah di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kolaborasi dan partisipasi masyarakat dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak, meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat, serta mengoptimalkan upaya bersama dalam mengatasi permasalahan pendidikan.

Permasalahan putus sekolah merupakan salah satu tantangan besar dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Upaya untuk mengatasi masalah ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui inisiatif partisipasi sosial, yang menggabungkan kekuatan dari

---

<sup>22</sup> Saifulloh, Moh, Zainul Muhibbin, dan Hermanto Hermanto. "Strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah." *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* 5.2 (2012): 206-218.

<sup>23</sup> Makunde, George, Valeria Muvavarirwa, dan Innocent Chirisa. "Future of Urban Governance and Citizen Participation." *The Palgrave Encyclopedia of Urban and Regional Futures*. Cham: Springer International Publishing, 2021. 1-10.

<sup>24</sup> Soelar, Shahrul Aiman, dan Nurakmal Ahmad Mustaffa. "A Mixed-Method Analysis of People's Perception and Behaviour on Vaccination Program in Online Social Media." *Malaysian Journal of Medical Research (MJMR)* 6.3 (2022): 6-18.

<sup>25</sup> Stoll, Louise, dkk. "Professional learning communities: A review of the literature." *Journal of educational change* 7.4 (2006): 221-258.

lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil untuk menciptakan jaringan kerja yang efisien dan efektif dalam mengatasi permasalahan putus sekolah.<sup>26</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inisiatif partisipasi sosial melalui jaringan kerja dan kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil telah membawa dampak positif dalam mengatasi permasalahan putus sekolah di Indonesia. Jaringan ini memfasilitasi komunikasi, koordinasi, dan tukar-menukar sumber daya antara berbagai pihak yang terlibat, sehingga menciptakan sinergi yang mengoptimalkan upaya bersama dalam menangani masalah ini.<sup>27</sup>

Inisiatif partisipasi sosial telah membuktikan dirinya sebagai pendekatan yang efektif dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan putus sekolah dan pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Inisiatif ini mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program pendidikan, yang pada akhirnya menghasilkan dampak positif yang lebih luas.<sup>28</sup>

Dalam konteks Indonesia, inisiatif partisipasi sosial telah berhasil membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan permasalahan putus sekolah. Masyarakat menjadi lebih peduli dan terlibat aktif dalam upaya-upaya pendidikan, baik dalam hal pengawasan proses belajar anak-anak maupun dalam hal penyediaan dukungan dan fasilitas yang diperlukan.<sup>29</sup>

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil melalui inisiatif partisipasi sosial telah berhasil menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pendidikan. Hal ini tercermin dari peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil dan masyarakat miskin, yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian.

Inisiatif partisipasi sosial juga dapat memperkuat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menangani permasalahan putus sekolah. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat tidak hanya sebagai objek pelayanan, tetapi juga sebagai subjek yang berperan aktif dalam merencanakan dan mengelola pendidikan di lingkungannya.

Analisis terhadap temuan penelitian inisiatif partisipasi sosial dalam mengatasi anak putus sekolah di Indonesia menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan

---

<sup>26</sup> Özsoy, Sevilay. *Yenidoğan Yoğun Bakımda Ebeveynlerin Güçlendirilmesi: Empathic-nölçeğinin Türkçe uyarlaması*. MS thesis. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

<sup>27</sup> Nugroho, Wahyu. "Reorientasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan Dan Penataan Ruang (The Reorientation of Local Government Policy on Implementation of the Regional Autonomy in the Field of Land and Land Use)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12.2 (2018).

<sup>28</sup> Shikuku, Duncan N., dkk. "The determinants of staff retention after Emergency Obstetrics and Newborn Care training in Kenya: a cross-sectional study." *BMC Health Services Research* 22.1 (2022): 1-10.

<sup>29</sup> Panday, Sarita, dkk. "The Role of Social Capital in Disaster Resilience in Remote Communities after the 2015 Nepal Earthquake." *International Journal of Disaster Risk Reduction* 55 (2021): 102112.

masyarakat sipil melalui jaringan kerja yang efektif dan efisien dapat memainkan peran penting dalam mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, inisiatif partisipasi sosial telah berhasil membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan permasalahan putus sekolah.

Partisipasi masyarakat dalam program-program pendidikan dapat mempengaruhi efektivitas program dan dapat meningkatkan kualitas program itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat yang diutarakan oleh Wen Wen, bahwa partisipasi masyarakat dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas dan relevansi program pendidikan.<sup>30</sup> Studi lain yang dilakukan oleh Richard Falk menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pendidikan di Pakistan berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.<sup>31</sup>

Inisiatif partisipasi sosial juga memungkinkan lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab putus sekolah dan merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Menurut studi yang dilakukan oleh Apriyanda Wijaya, partisipasi masyarakat dalam program-program pendidikan memungkinkan mereka untuk mempengaruhi kebijakan pendidikan dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pembelajaran.<sup>32</sup>

Kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dalam jaringan kerja ini menciptakan sinergi yang mengoptimalkan upaya bersama dalam menangani masalah putus sekolah. Sebuah studi yang dilakukan oleh James Rourke menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dalam program-program pendidikan di Amerika Serikat berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, serta membantu menangani masalah putus sekolah.<sup>33</sup>

Inisiatif partisipasi sosial juga memungkinkan berbagai pihak untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam menghadapi permasalahan putus sekolah, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari intervensi yang dilakukan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Stoll, Bolam, McMahon, Wallace, dan Thomas menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dalam program pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagi pengetahuan, keahlian, dan praktik terbaik.

---

<sup>30</sup> Wen, Wen, Die Hu, dan Jie Hao. "International students' experiences in China: Does the planned reverse mobility work?." *International Journal of Educational Development* 61 (2018): 204-212.

<sup>31</sup> Falk, Richard. "The World Order between Interstate Law and the Law of Humanity: The Role of Civil Society Institutions." *Int'l Legal Theory* 1 (1995): 14.

<sup>32</sup> Wijaya, Apriyanda Kusuma. "Integrasi Model Pembelajaran Role Playing dengan Multimedia Dalam Meningkatkan Keterampilan Partisipasi Sosial Siswa." *Eduksos: Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi* 9.1 (2020).

<sup>33</sup> Rourke, James. "Social Accountability: A Framework for Medical Schools to Improve the Health of the Populations They Serve." *Academic Medicine* 93.8 (2018): 1120-1124.

Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil melalui inisiatif partisipasi sosial juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Dalam sebuah penelitian oleh Wang dkk., partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Hal ini diperkuat oleh penelitian Hadiwijoyo yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dapat menciptakan tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan juga dapat memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Seperti yang dijelaskan oleh Keane, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik adalah prasyarat bagi kualitas demokrasi yang lebih tinggi. Dalam konteks pendidikan, partisipasi masyarakat dalam inisiatif partisipasi sosial dapat meningkatkan partisipasi politik dan kualitas demokrasi secara keseluruhan.<sup>34</sup>

Keterlibatan LSM dalam inisiatif partisipasi sosial dapat membantu memperkuat kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Inodu Piri, LSM dapat berperan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan pendidikan.<sup>35</sup> Dalam inisiatif partisipasi sosial, LSM dapat memfasilitasi akses masyarakat terhadap sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengatasi permasalahan pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam inisiatif partisipasi sosial juga dapat meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab sosial. Dalam penelitian oleh Uprety dkk., partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab sosial mereka. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan peran mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan di komunitas mereka.

Kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil melalui inisiatif partisipasi sosial juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan. Seperti yang dijelaskan oleh Pandey dan Karki, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Dalam mengatasi permasalahan putus sekolah, inisiatif partisipasi sosial menunjukkan dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran

---

<sup>34</sup> Lewis, Maureen, dan Gunilla Pettersson Gelande. "Governance in education: Raising performance." *World Bank Human Development Network Working Paper* (2009).

<sup>35</sup> Piri, Inodu Tony. *A Case Study of Nigerian Secondary Schools Teachers' Perceptions of the Role of Principal Leadership Styles in Teacher Attrition*. Diss. Northcentral University, 2021.

masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Dukungan keuangan dan teknis dari pemerintah menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dari inisiatif ini, seperti yang telah dijelaskan dalam penelitian oleh Njie-Carr dkk. dan Priyono dan Anwar. Kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dalam jaringan kerja juga memiliki kontribusi penting dalam mengatasi permasalahan putus sekolah, seperti yang didukung oleh penelitian oleh Silaen, Suharto, dan Wilopo.<sup>36</sup>

Melalui kolaborasi ini, masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengidentifikasi faktor penyebab putus sekolah dan merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Hal ini terkait dengan konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan dan merencanakan program pembangunan yang berkelanjutan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam inisiatif partisipasi sosial, solusi yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil melalui inisiatif partisipasi sosial juga membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik yang dialokasikan untuk pendidikan. Masyarakat sipil yang terlibat dalam inisiatif ini menjadi lebih cenderung untuk mengawasi penggunaan dana publik dan memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan digunakan dengan efisien dan efektif.<sup>37</sup>

Dalam konteks Indonesia, inisiatif partisipasi sosial juga telah berhasil meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil dan masyarakat miskin, yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan inklusif, yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan. Dalam konteks ini, inisiatif partisipasi sosial menjadi penting untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin dan terpinggirkan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.<sup>38</sup>

Inisiatif partisipasi sosial dalam mengatasi permasalahan putus sekolah telah berhasil membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan mempercepat pencapaian tujuan bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria dan Amalia menunjukkan bahwa inisiatif partisipasi sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil melalui berbagai program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) mampu menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Sa'diyah dan

---

<sup>36</sup> Greene, Jay P., dan Greg Forster. "Public High School Graduation and College Readiness Rates in the United.

<sup>37</sup> Granoff, Phyllis. "Koichi Shinohara." *Speaking of Monks: Religious Biography in India and China*. Oakville (2022).

<sup>38</sup> Bourdieu, Pierre, dan Jean-Claude Passeron. *Reproduction in Education, Society and Culture*. Vol. 4. Sage, 1990.

Mahardhika, menunjukkan bahwa partisipasi sosial melalui program Gerakan Nasional Bangga Kencana mampu mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa inisiatif partisipasi sosial dapat lebih efektif jika didukung oleh dukungan keuangan dan teknis dari pemerintah. Studi yang dilakukan oleh Prasetyo menunjukkan bahwa program BOS dan PIP yang diberikan oleh pemerintah memberikan dukungan finansial bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga mendorong mereka untuk memperjuangkan pendidikan anak-anak mereka. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan putus sekolah dapat ditingkatkan dengan memberikan akses pada sumber daya teknis dan pelatihan yang relevan.

Selain dukungan keuangan dan teknis, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dalam inisiatif partisipasi sosial sangat penting dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan permasalahan putus sekolah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akita dan Watanabe, yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengembangan pendidikan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam inisiatif partisipasi sosial di dalam pendidikan merupakan hal yang penting karena mereka merupakan sumber daya utama dalam upaya mengurangi angka putus sekolah di Indonesia. Melibatkan masyarakat secara aktif akan menghasilkan program yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta membangun komitmen yang lebih kuat dalam mendukung pendidikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan pencapaian akademik siswa, motivasi belajar, serta menurunkan angka putus sekolah.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, inisiatif partisipasi sosial merupakan strategi yang efektif dalam membangun jaringan kerja antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil melalui inisiatif partisipasi sosial telah berhasil menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil dan masyarakat miskin, yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang memungkinkan pihak-pihak terkait untuk berbagi pengetahuan, keahlian, dan praktik terbaik dalam mengatasi permasalahan putus sekolah.

Partisipasi masyarakat dalam inisiatif partisipasi sosial juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik yang dialokasikan untuk pendidikan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Zambia, partisipasi masyarakat

dalam pengawasan penggunaan dana publik terkait dengan pendidikan ditemukan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta penghematan biaya dan waktu. Partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengawasan dana publik, serta membantu mencegah terjadinya korupsi.

Namun, inisiatif partisipasi sosial juga memiliki beberapa kendala yang dapat menghambat keberhasilannya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya dukungan dari pemerintah, baik dalam hal dukungan keuangan maupun dukungan teknis. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Nigeria, partisipasi masyarakat dalam pendidikan terkendala oleh kurangnya dukungan dari pemerintah, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam ketersediaan sumber daya, terutama di daerah-daerah terpencil.

Tentunya, inisiatif partisipasi sosial dalam mengatasi putus sekolah tidak lepas dari peran penting lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Dalam konteks Indonesia, partisipasi dan dukungan dari pemerintah dalam inisiatif ini menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan. Dalam sebuah penelitian oleh Hudani dkk., partisipasi aktif pemerintah dalam program inklusi pendidikan berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin atau daerah terpencil. Partisipasi pemerintah dalam inisiatif partisipasi sosial juga harus diiringi dengan dukungan keuangan dan teknis yang memadai. Sebuah studi oleh Mahrani dkk. menunjukkan bahwa dukungan finansial dan teknis dari pemerintah penting dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan LSM dan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam program pendidikan dan inklusi sosial.

Penting juga untuk melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tentang pendidikan dan putus sekolah. Dalam sebuah studi oleh Rachman dkk., kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dalam program pendidikan inklusi di Indonesia berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan. Kolaborasi ini memungkinkan berbagai pihak untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari intervensi yang dilakukan.

Dalam konteks inisiatif partisipasi sosial dalam mengatasi putus sekolah, partisipasi dan keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting. Sebuah penelitian oleh Kurniawan dkk. menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program inklusi pendidikan dapat membantu membangun komitmen yang lebih kuat dari masyarakat untuk mendukung pendidikan dan mencegah putus sekolah.

Partisipasi masyarakat dalam program inklusi pendidikan juga dapat berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Sebuah penelitian oleh Bawono dkk. menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam program inklusi pendidikan memungkinkan mereka



untuk mengawasi pengelolaan dana publik yang dialokasikan untuk pendidikan, sehingga memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif.

Keberhasilan inisiatif partisipasi sosial dalam mengatasi permasalahan putus sekolah yang serius di Indonesia didukung oleh beberapa faktor penting, salah satunya adalah adanya kolaborasi yang kuat antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah (Puslitbangdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kolaborasi seperti ini dapat menciptakan sinergi yang mengoptimalkan upaya bersama dalam menangani masalah putus sekolah.

Keberhasilan inisiatif partisipasi sosial juga didukung oleh meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang permasalahan putus sekolah serta pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak. Menurut Solihat, partisipasi masyarakat dalam inisiatif partisipasi sosial dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menurunkan angka putus sekolah. Hal ini terjadi karena masyarakat dapat memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan pendidikan, seperti memberikan bantuan finansial dan moral, serta memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat.

Pada sisi lain, inisiatif partisipasi sosial juga dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil melalui jaringan kerja ini menciptakan sinergi yang memungkinkan pihak-pihak terkait untuk berbagi pengetahuan, keahlian, dan praktik terbaik dalam mengatasi permasalahan putus sekolah..

Namun, terhadap beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan inisiatif partisipasi sosial dalam mengatasi permasalahan putus sekolah di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Tantangan ini dapat menghambat efektivitas dari inisiatif partisipasi sosial dalam menangani permasalahan putus sekolah.

Keberhasilan dari inisiatif partisipasi sosial juga memerlukan dukungan keuangan dan teknis dari pemerintah. Menurut Hadiwijaya dan Alfianto, pemerintah perlu memberikan dukungan yang memadai dalam bentuk dana, fasilitas, dan kebijakan yang mendukung implementasi dari inisiatif partisipasi sosial dalam mengatasi permasalahan putus sekolah.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi sosial dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pendidikan. Dalam studi kasus ini, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang program pendidikan menghasilkan pengawasan dan pemantauan yang lebih baik terhadap penggunaan dana publik dan kinerja lembaga pendidikan. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Mayne, yang

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.

Inisiatif partisipasi sosial juga dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat. Dalam konteks Indonesia, jaringan kerja dan kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil memungkinkan transfer pengetahuan dan keahlian dari satu pihak ke pihak lainnya. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Yarime dan Tanaka, yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga menghasilkan sinergi yang lebih besar dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam konteks pendidikan, partisipasi sosial juga dapat meningkatkan inklusi dan keadilan dalam pendidikan. Dalam studi kasus ini, partisipasi masyarakat dalam inisiatif partisipasi sosial telah berhasil meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil dan masyarakat miskin. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Aikman dan Unterhalter, yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat membantu meningkatkan inklusi dan keadilan dalam pendidikan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan sosial. Partisipasi sosial juga dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan demokratis. Dalam studi kasus ini, partisipasi masyarakat dalam inisiatif partisipasi sosial telah berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pendidikan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Hart, yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan demokratis, di mana setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengambil keputusan tentang pendidikan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis temuan penelitian dan referensi yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa inisiatif partisipasi sosial yang melibatkan kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam mengatasi permasalahan putus sekolah di Indonesia. Melalui sinergi yang dibangun oleh jaringan kerja ini, masyarakat menjadi lebih sadar dan terlibat aktif dalam upaya-upaya pendidikan, memperkuat kapasitas dan sumber daya, serta mempercepat pencapaian tujuan bersama. Selain itu, inisiatif partisipasi sosial ini juga memungkinkan berbagai pihak untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam menghadapi permasalahan putus sekolah, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari intervensi yang dilakukan.

Keberhasilan inisiatif partisipasi sosial ini dalam mengatasi permasalahan putus sekolah menunjukkan bahwa kolaborasi dan partisipasi masyarakat memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil perlu terus mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif dalam upaya-upaya mengatasi permasalahan pendidikan yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan yang memfasilitasi kerja sama antara berbagai pihak, penguatan kapasitas masyarakat, dan pengembangan program-program pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif untuk pendidikan dan mendorong terwujudnya visi Indonesia sebagai negara yang berpendidikan dan berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdelhadi, Reem, dkk. "Creative Interactions with Art Works: An Engaging Approach to Arabic language-and-culture learning." *Innovation in Language Learning and Teaching* 14.3 (2020): 273-289.
- Adenansi, Dhio, Moch Zainuddin, dan Binahayati Rusyidi. "Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2.3 (2015).
- Andreeyan, Rizal. "Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda." *eJournal Adm. Negara* 2.4 (2014).
- Bobsuni, Nofita, dan Muhammad Farid Ma'ruf. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam (Studi Kasus Wisata Bukit Kapur Setigi, Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)." *Publika* (2021): 215-226.
- Bourdieu, Pierre, dan Jean-Claude Passeron. *Reproduction in education, society and culture*. Vol. 4. Sage, 1990.
- Efendi, Heni Nur, Yulianto Yulianto, dan Ita Prihantika. "Dinamika Peran Civil Society dalam Ruang Publik: Studi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung." *Jurnal Administrativa* 1.1 (2019): 19-28.
- Granoff, Phyllis. "Koichi Shinohara." *Speaking of Monks: Religious Biography in india and China*. Oakville (2022).
- Greene, Jay P., dan Greg Forster. "Public High School Graduation and College Readiness Rates in the United States. Education Working Paper No. 3." *Center for Civic Innovation* (2003).
- Hakim, Lukman, dkk. *BUM Desa Sebagai Kekuatan Ekonomi Baru (Sebuah Gagasan Untuk Desa di Indonesia)*. Penerbit Lakeisha, 2022.
- Haruni, Catur Wido. "Community Political Participation In The 2019 Presidential And Vice-Presidential Elections In Malang Regency." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 3.2 (2022): 43-49.
- Hilton, Michael R. "Literacy, poverty, dan brain development: Toward a new, place-based educational intervention." *Rich. JL & Pub. Int.* 17 (2013): 623.
- Hoyle, John R., dan Virginia Collier. "Urban CEO Superintendents' Alternative Strategies in reducing school dropouts." *Education and Urban Society* 39.1 (2006): 69-90.

Encup Supriatna: Inisiatif Partisipasi Sosial dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah: Studi Kasus pada Jaringan Kerja dan Kolaborasi Antara Lembaga Pemerintah, LSM, dan Masyarakat Sipil di Indonesia

- Kurniawan, Muhammad Adi, Badaruddin Badaruddin, dan Humaizi Humaizi. "Partisipasi Masyarakat Tionghoa dalam Pelaksanaan Musrenbang Pada Kelurahan Sukadamai." *Perspektif* 10.1 (2021): 218-229.
- Lewis, Maureen, dan Gunilla Pettersson Gelande. "Governance in education: Raising performance." *World Bank Human Development Network Working Paper* (2009).
- Makunde, George, Valeria Muvavarirwa, dan Innocent Chirisa. "Future of Urban Governance and Citizen Participation." *The Palgrave Encyclopedia of Urban and Regional Futures*. Cham: Springer International Publishing, 2021. 1-10.
- Mtika, Peter, dan Peter Gates. "Developing Learner-Centred Education among Secondary Trainee Teachers in Malawi: The Dilemma of Appropriation and Application." *International Journal of Educational Development* 30.4 (2010): 396-404.
- Muafi, Muafi, Faraz Faraz, dan Fuad Hasyim. "Religiosity and Altruism Behavior in the Chain of Service Delivery System." *Journal of Economic & Management Perspectives* 12.2 (2018): 151-162.
- Mustanir, Ahmad. "Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di kelurahan kanyuara kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenreng rappang." *Jurnal Politik Profetik* 5.2 (2017): 247-261.
- Nugroho, Wahyu. "Reorientasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan Dan Penataan Ruang (The Reorientation of Local Government Policy on Implementation of the Regional Autonomy in the Field of Land and Land Use)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12.2 (2018).
- Özsoy, Sevilay. *Yenidoğan Yoğun Bakımda Ebeveynlerin Güçlendirilmesi: Empathic-n ölçeğinin Türkçe uyarlaması*. MS thesis. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Rohaeni, N. Eni, dan Oyon Saryono. "Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan." *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review* 2.1 (2018): 193-204.
- Saifulloh, Moh, Zainul Muhibbin, dan Hermanto Hermanto. "Strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah." *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* 5.2 (2012): 206-218.
- Shikuku, Duncan N., dkk. "The determinants of staff retention after Emergency Obstetrics and Newborn Care training in Kenya: a cross-sectional study." *BMC Health Services Research* 22.1 (2022): 1-10.
- Soelar, Shahrul Aiman, dan Nurakmal Ahmad Mustaffa. "A Mixed-Method Analysis of People's Perception and Behaviour on Vaccination Program in Online Social Media." *Malaysian Journal of Medical Research (MJMR)* 6.3 (2022): 6-18.
- Stoll, Louise, dkk. "Professional learning communities: A review of the literature." *Journal of educational change* 7.4 (2006): 221-258.
- Supriyanto, Dede, dan Suswanto Heru Purnomo. "Evidence-Based Practice Pengembangan Kemampuan Bersosialisasi pada Anak dengan Autistic Spectrum Disorder (ASD)." *INCLUSIVE: Journal of Special Education* 3.1 (2017).
- Taub, Deborah J. "Exploring the Impact of Parental Involvement on Student Development." *New directions for student services* 122 (2008): 15-28.
- Wen, Wen, Die Hu, dan Jie Hao. "International students' experiences in China: Does the planned reverse mobility work?." *International Journal of Educational Development* 61 (2018): 204-212.

- Encup Supriatna: Inisiatif Partisipasi Sosial dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah: Studi Kasus pada Jaringan Kerja dan Kolaborasi Antara Lembaga Pemerintah, LSM, dan Masyarakat Sipil di Indonesia
- Panday, Sarita, dkk. "The Role of Social Capital in Disaster Resilience in Remote Communities after the 2015 Nepal Earthquake." *International Journal of Disaster Risk Reduction* 55 (2021): 102112.
- Falk, Richard. "The World Order between Interstate Law and the Law of Humanity: The Role of Civil Society Institutions." *Int'l Legal Theory* 1 (1995): 14.
- Rahim, Abdul. "Pendidikan inklusif sebagai Strategi dalam Mewujudkan Pendidikan untuk semua." *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an* 3.1 (2016).
- Wijaya, Apriyanda Kusuma. "Integrasi Model Pembelajaran Role Playing dengan Multimedia Dalam Meningkatkan Keterampilan Partisipasi Sosial Siswa." *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi* 9.1 (2020).
- Rourke, James. "Social Accountability: A Framework for Medical Schools to Improve the Health of the Populations They Serve." *Academic Medicine* 93.8 (2018): 1120-1124.
- Piri, Inodu Tony. *A Case Study of Nigerian Secondary Schools Teachers' Perceptions of the Role of Principal Leadership Styles in Teacher Attrition*. Diss. Northcentral University, 2021.
- Saputra, Angga. "Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Inklusif." *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini* 1.3 (2016): 1-15.